



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III 2019



Penyusun :  
Penanggung Jawab : Tauhid  
Ketua Tim : Siti Rosidah Sundari  
Editor : Firza Yulianti  
Desain Grafis : Hasbi Jusuma Leo  
Anggota : Arif Bakhri, Subur, Ahmad Firdaus,  
Markus Yulianto, Lukas Wanastya

**KANWIL DITJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

## KATA PENGANTAR

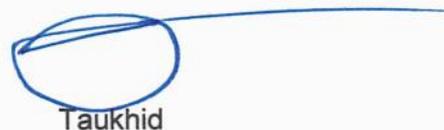
Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2019.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun bagi para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyediakan data dan informasi hingga terbitnya Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan dan dapat diterbitkannya hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan secara berkala. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan agar perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas hasil kajian dapat terus dilakukan.

Harapan kami semoga laporan hasil Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi penting dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, *stakeholders* di Sumatera Selatan, dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, November 2019  
Kepala Kantor Wilayah,



Taukhid

## DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	
A.	Produk Domestik Regional Bruto .....	1
B.	Inflasi .....	2
C.	Indikator Kesejahteraan .....	3
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	
A.	Pendapatan Negara.....	6
B.	Belanja Negara.....	10
C.	Prognosis Realisasi APBN.....	13
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	
A.	Pendapatan Daerah.....	15
B.	Belanja Daerah.....	18
C.	Prognosis Realisasi APBD.....	18
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	
A.	Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian .....	19
B.	Pendapatan Konsolidasian .....	19
C.	Belanja Konsolidasian .....	21
D.	Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB .....	22
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH .....	24

## Daftar Grafik

Grafik I.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2014 – 2018.....	1
Grafik I.2.	Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.....	2
Grafik I.3.	Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan.....	4
Grafik II.1.	Penerimaan PPh Berdasarkan Wilayah kerja KPPN s.d Triwulan III 2019.....	6
Grafik II.2.	Penerimaan PPN Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan III 2019.....	7
Grafik II.3.	Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional s.d Triwulan III 2019.....	8
Grafik II.4.	Realisasi PNBPN BLU di Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019.....	9
Grafik II.5.	Realisasi PNBPN Lainnya Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan III 2019.....	9
Grafik II.6.	Perkembangan Bulanan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode s/d Tw III 2019.....	10
Grafik II.7.	Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun 2019.....	11
Grafik III.1.	Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2017-2019.....	16
Grafik III.2.	PAD Lainnya Triwulan III Tahun 2017-2019.....	17
Grafik III.3.	Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan II Tahun 2019.....	17
Grafik III.4.	Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Urusan	18
Grafik IV.1.	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2018.....	20
Grafik IV.2.	Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019.....	20
Grafik IV.3.	Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2018.....	22
Grafik IV.4.	Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III 2019.....	23

## DAFTAR TABEL

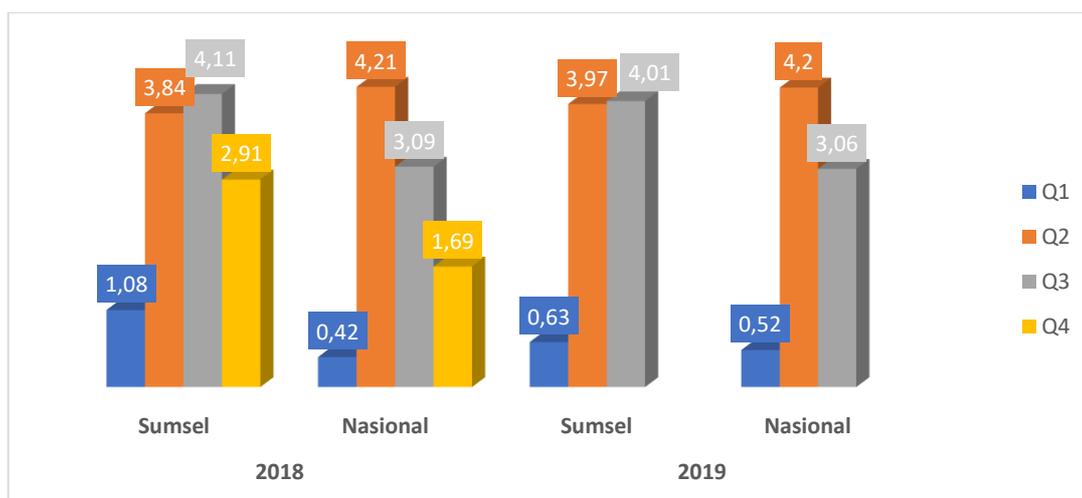
Tabel II.1.	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2017-2019.....	5
Tabel II.2.	Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan III Tahun 2017-2019.....	6
Tabel II.3.	Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja s/d Triwulan III Tahun 2017-2019.....	10
Tabel II.4.	Pendapatan BLU dan Belanja yang menggunakan Sumber Dana BLU untuk BLU di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019.....	12
Tabel II.5.	Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Posisi s.d. 30 Juni 2019.....	12
Tabel II.6.	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Perekonomian s/d September Tahun 2019.....	13
Tabel II.7.	Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2019.....	13
Tabel III.1.	Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2019.....	14
Tabel III.2.	Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2019.....	15
Tabel III.3.	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 dengan analisis tren.....	19
Tabel IV.1.	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019.....	19

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

Grafik I.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan 2019 (q-to-q)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

*Secara Quarter to Quarter* Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan III-2019 terhadap triwulan II-2019 tumbuh sebesar 4,01 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,69 persen. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 5,88 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh sebesar 5,54 persen.

*Secara year-on-year* Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan III tahun 2019 terhadap triwulan II tahun 2019 tumbuh 5,67 persen melebihi pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,06 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 14,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,06 persen.

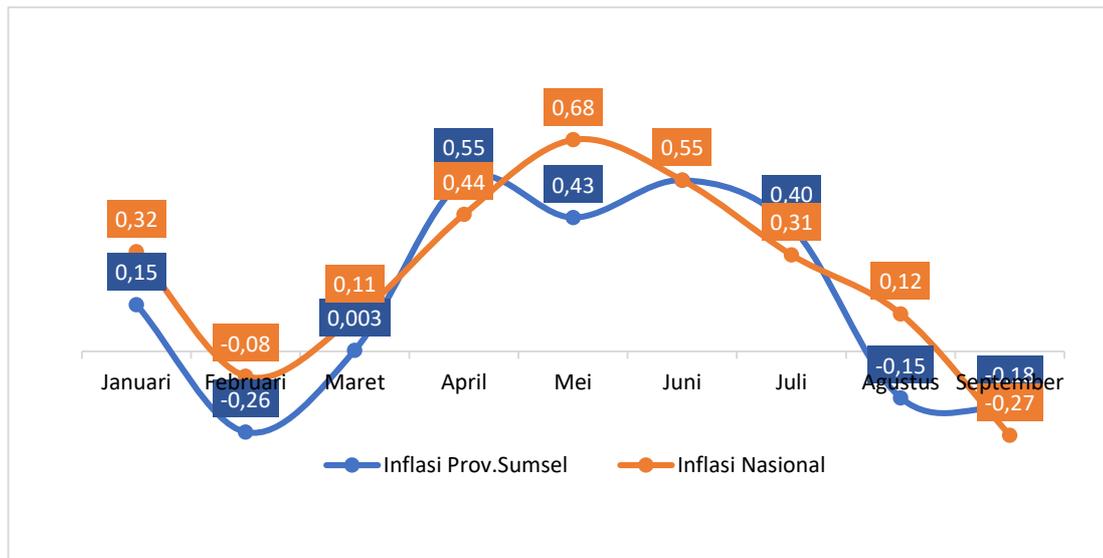


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan III-2019 terhadap triwulan II-2019 tumbuh sebesar 4,01 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,69 persen. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 5,88 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 5,54 persen.

**B. Inflasi**

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

**Grafik I.2. Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi bulanan pada Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2019 berfluktuasi. Pada bulan Juni 2019 terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya dimana inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,55 persen. Hal ini sama persis jika dibanding inflasi secara nasional. Adapun komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada bulan Juni 2019 di Provinsi Sumatera Selatan adalah cabe merah, emas perhiasan, daging ayam ras, ketimun, beras, tomat sayur dan angkutan antar kota.

## C. Indikator Kesejahteraan

### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2019 mencapai 4,48 persen, mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2018 sebesar 4,23 persen atau naik 0,25 persen, Hal ini disebabkan karena meningkatnya Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2019 sebanyak 4,15 juta orang, bertambah sebanyak 15,5 ribu orang atau naik sebesar 0,37 persen dibandingkan Agustus 2018 sementara Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2019 mencapai 3,97 juta orang, bertambah sebanyak 4,6 ribu orang atau naik sebesar 0,12 persen dibandingkan keadaan Agustus 2018.

Selama periode Agustus 2018 – Agustus 2019 terdapat 10 (sepuluh) lapangan usaha mengalami peningkatan penyerapan penduduk bekerja, yaitu: kategori Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Perdagangan, Jasa Lainnya, Pertambangan, Konstruksi, Jasa Perusahaan, Listrik, Gas, dan Air, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan, dan Aktivitas Keuangan.

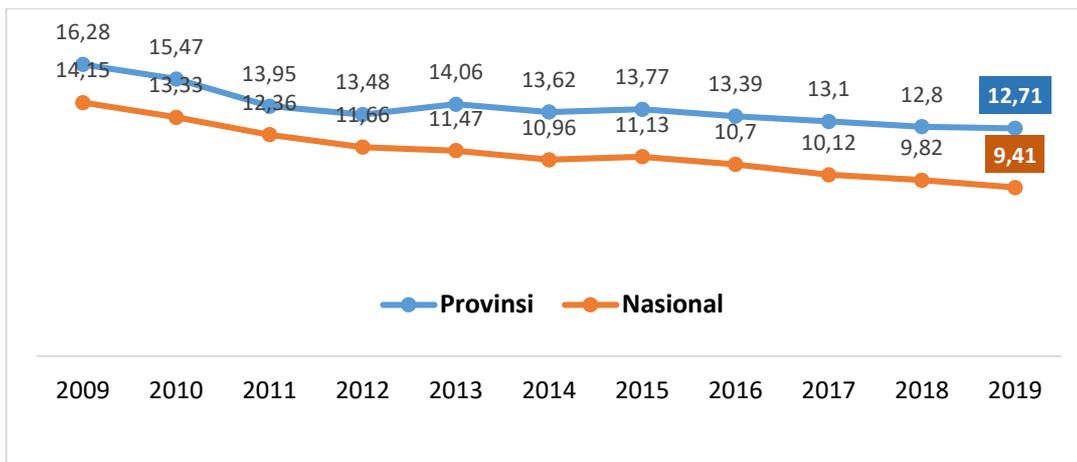
Berdasarkan jumlah jam kerja, keadaan Agustus 2019 dari 3,97 juta penduduk yang bekerja sebanyak 2,55 juta orang atau sebesar 64,27 persen bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari atau sama dengan 7 jam per minggu mencapai 69,6 ribu orang atau sebesar 1,75 persen. Keadaan Agustus 2019, penduduk bekerja berpendidikan tamat SD ke bawah masih mendominasi penyerapan lapangan kerja sebesar 43,83 persen.

### 2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin diukur berdasarkan tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp446.706,00 di perkotaan dan Rp389.786,00 di pedesaan.



**Grafik I.3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2019 di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.073,74 ribu orang atau sebesar 12,71 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan periode September 2018 yang sebesar 12,82 persen, sedangkan jumlahnya berkurang sebanyak 2,66 ribu orang dari 1.076,40 ribu orang. Meskipun demikian penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih di atas rata-rata penduduk miskin secara nasional yang sebesar 9,41 persen.

Jika dilihat dari target RPJMD, walaupun penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan namun masih belum memenuhi target persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 yang sebesar 11,78 persen. Diharapkan pada sisa tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi di bawah 10 persen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pengelolaan BLU dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat. Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel II.1. yang disajikan dalam format *I-Account* dibawah ini.

**Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)**

URAIAN	2017			2018			2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>14.338,71</b>	<b>7.773,95</b>	<b>54,22</b>	<b>15.103,90</b>	<b>8.087,39</b>	<b>53,55</b>	<b>14.678,29</b>	<b>8.330,84</b>	<b>56,76</b>
I. Penerimaan Perpajakan	12.899,72	6.433,01	49,87	13.538,05	6.670,88	49,28	13.405,96	6.868,02	51,23
II. PNPB	1.438,99	1.340,94	93,19	1.565,85	1.416,51	90,46	1.272,33	1.462,82	114,97
III. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>49.535,39</b>	<b>29.179,29</b>	<b>58,91</b>	<b>43.686,35</b>	<b>29.275,88</b>	<b>67,01</b>	<b>48.736,73</b>	<b>32.237,06</b>	<b>66,15</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	13.758,23	7.876,66	57,25	15.102,89	7.965,23	52,74	16.168,44	9.264,51	57,30
1. Belanja Pegawai	4.291,16	3.045,27	70,97	4.655,04	3.302,51	70,94	4.721,11	3.635,84	77,01
2. Belanja Barang	5.177,77	2.897,75	55,97	6.835,64	3.165,08	46,30	7.354,03	4.433,58	60,29
3. Belanja Modal	4.262,83	1.915,68	44,94	3.598,64	1.492,28	41,47	4.075,27	1.186,94	29,13
4. Belanja Sosial	26,47	17,96	67,85	13,57	5,36	39,50	18,03	8,15	45,20
5. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	35.777,16	21.302,63	59,54	28.583,46	21.310,65	74,56	32.568,29	22.972,55	70,54
1. Transfer ke Daerah	33.509,90	19.948,62	59,53	26.269,34	19.923,44	75,84	29.884,34	21.364,78	71,49
a. DBH	15.375,99	6.094,81	39,64	7.232,03	4.900,94	67,77	10.194,65	6.626,03	65,00
b. DAU	12.219,36	10.191,35	83,40	12.331,39	10.268,07	83,27	12.877,30	10.749,68	83,48
c. DAK Fisik	2.122,40	1.165,11	54,90	2.357,10	1.423,24	60,38	2.186,79	739,21	33,80
d. DID	82,5	82,5	100,00	396,75	349	87,96	390,16	356,92	91,48
e. DAK Non Fisik	3.709,65	2.414,85	65,10	3.952,07	2.982,19	75,46	4.235,44	2.892,94	68,30
2. Dana Desa	2.267,26	1.354,01	59,72	2.314,12	1.387,21	59,95	2.683,95	1.607,77	59,90
<b>C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)</b>	<b>-35.196,68</b>	<b>-21.405,34</b>	<b>60,82</b>	<b>-28.582,45</b>	<b>-21.188,49</b>	<b>74,13</b>	<b>-34.058,44</b>	<b>-23.906,22</b>	<b>76,02</b>
<b>D. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: OM-SPAN, Monev PA, MPN-G2, Simtrada DJPK (diolah)

Pada tabel II.1. di atas, struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan dan PNPB. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan III tahun 2019 sebesar Rp8.33 triliun atau 56,76 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan dengan capaian sebesar 51,23 persen dan PNPB sebesar 114,97 persen. Komponen Hibah bernilai nihil karena pendapatan Hibah hanya terdapat pada level kementerian/lembaga atau pada APBN tingkat nasional sedangkan Hibah yang terdapat di satuan kerja daerah dicatat



sebagai belanja. Sama halnya dengan sisi Pembiayaan yang hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil.

Sisi belanja dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada Belanja Pemerintah Pusat, penyerapan belanja terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2018 menjadi 57,30 persen. Adapun capaian realisasi TKDD menurun dibanding realisasi pada tahun 2018 menjadi 70,54 persen. Kondisi Pendapatan dan Belanja diatas menyebabkan APBN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar Rp23,91 triliun yang menunjukkan bahwa arus kas masuk ke Sumatera Selatan melalui APBN lebih besar daripada arus kas yang keluar.

### A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dibagi menjadi Penerimaan Pajak dan PNBP.

#### 1. Pendapatan Perpajakan

Total pendapatan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2019 berjumlah Rp6,87 triliun. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar Rp97,14 miliar. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pendapatan perpajakan:

**Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)**

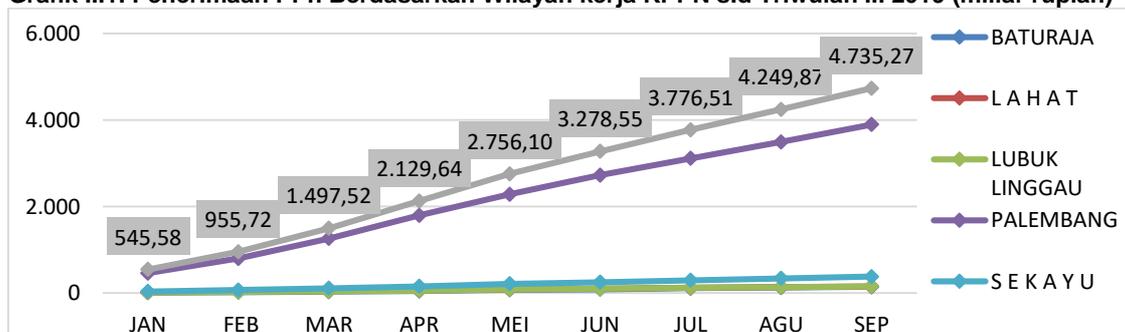
Jenis Pajak	Realisasi s.d. Triwulan III 2019		
	2017	2018	2019
PPh	3.840,54	4.601,00	4.735,27
PPN	2.079,32	1.889,65	1.740,34
PBB	182,44	83,21	266,95
Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional	255,31	102,56	67,41
Pajak Lainnya	75,40	94,46	58,02
<b>JUMLAH</b>	<b>6.433,01</b>	<b>6.770,88</b>	<b>6.868,02</b>

Sumber: MONEVPA OMSPAN 07-08-2019 (diolah)

#### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan total pajak penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2019 berjumlah Rp4,74 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN sebagai berikut:

**Grafik II.1. Penerimaan PPh Berdasarkan Wilayah kerja KPPN s.d Triwulan III 2019 (miliar rupiah)**



Sumber: MONEVPA OMSPAN 07-08-2019 (diolah)

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 82,29% disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu dengan selisih nominal yang mencapai Rp 3,52 triliun. Besarnya selisih tersebut menunjukkan bahwa pesebaran lapangan usaha masih terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang. Adapun pendapatan terendah terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Baturaja dengan realisasi sebesar Rp109,01 miliar atau sekitar 3,03% dari total pendapatan pajak penghasilan di Sumatera Selatan.

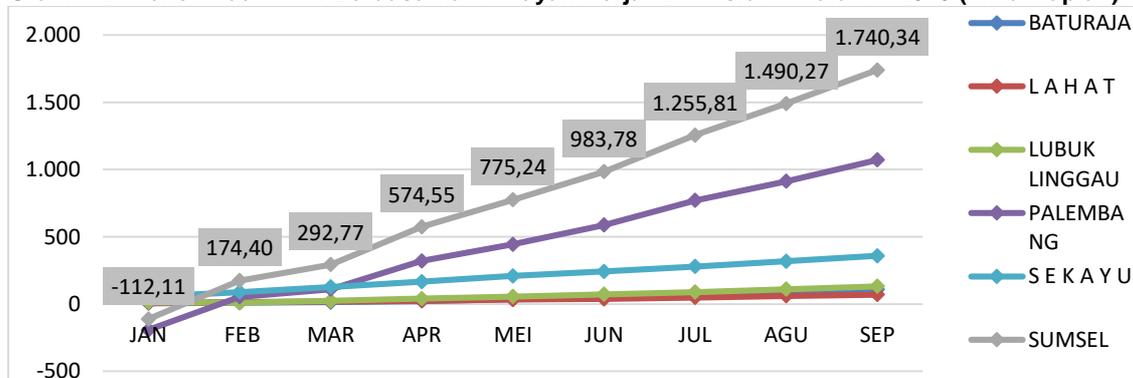
Dari grafik diatas terlihat bahwa tren pendapatan PPh pada triwulan III tahun 2019 terus mengalami kenaikan meskipun dengan adanya kebijakan percepatan restitusi pajak yang menyebabkan melonjaknya permintaan dan realisasi *restitusi pajak*.

*Realisasi restitusi PPh lingkup Sumatera Selatan hingga September 2019 meningkat sebesar Rp97,14 Miliar atau 1,43% dari Realisasi Restitusi PPh periode yang sama pada tahun 2018.*

#### b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Total Pendapatan PPN dan PPnBM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp1,74 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut:

**Grafik II.2. Penerimaan PPN Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan III 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : MONEVPA OMSPAN 07-08-2019 (diolah)

Berkebalikan dengan PPh, pendapatan PPN pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,90 persen dibandingkan tahun 2018 meskipun kondisi perekonomian semesteran bertumbuh sebesar 5,67 persen (y-o-y) pada saat ini. Kondisi ini diindikasikan sebagai konsekuensi dari percepatan realisasi restitusi pajak sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Realisasi PPN sempat bernilai negatif di bulan Januari akibat pengembalian kelebihan bayar PPN Tahun 2018 sebesar 300,04 miliar yang direalisasikan pada tanggal 10 Januari 2019 di Kabupaten OKI.



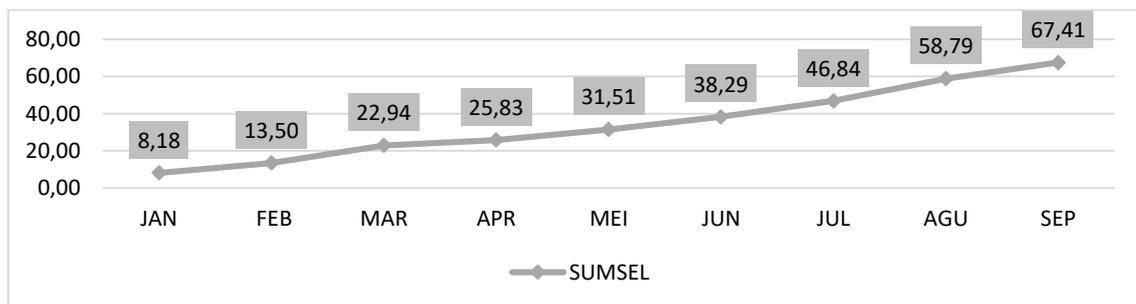
Kab/kota di wilayah kerja KPPN Palembang menjadi kab/kota penyumbang pendapatan PPN tertinggi di lingkup Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi penerimaan sebesar 61,58 persen dibandingkan total realisasi PPN di Sumatera Selatan. Jumlah ini tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kontribusi PPh diatas, yang mengindikasikan bahwa aktifitas pertambahan nilai dari barang/jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen atau aktifitas usaha pengolahan yang sudah dapat dikenakan pajak tidak terlalu terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang lagi meskipun jumlahnya masih relatif kecil.

*Realisasi restitusi PPN di Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019 mencapai Rp1,40 triliun atau sebesar 46,75% dari Setoran PPN lingkup Sumatera Selatan yang sebesar Rp2,99 triliun.*

**c. Pendapatan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional**

Pendapatan Cukai dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019 berjumlah Rp67,41 miliar. Jumlahnya menurun 34,27% dibanding pendapatan Triwulan III tahun 2018 yang sebesar Rp102,56 miliar.

**Grafik II.3. Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional s.d Triwulan III 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : MONEVPA OM-SPAN 07-08-2019 (diolah)

Pendapatan pada sub bab ini merupakan jenis pendapatan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berbeda halnya dengan data perpajakan yang disajikan per KPPN, data pendapatan cukai dan perdagangan internasional disajikan secara total dikarenakan tempat transaksi dari jenis pendapatan ini berpusat di Kota Palembang. Penurunan sejumlah 34,27 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor dan impor di Sumatera Selatan masing-masing sebesar 10,96 persen dan 41,91 persen pada periode yang sama.

Dari ketiga subbab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aktifitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan sebagian besar masih terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang selaku ibukota provinsi dan Kab/kota di wilayah kerja KPPN Sekayu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ibukota provinsi.

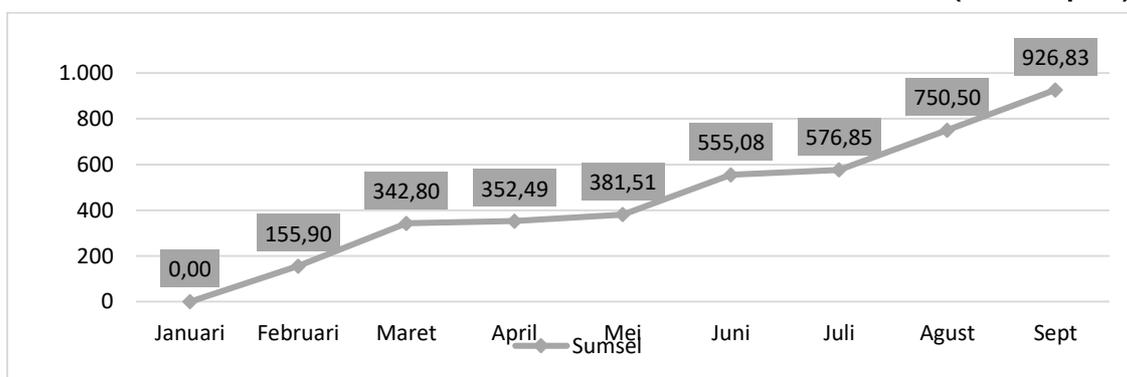
## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Total penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III 2019 berjumlah Rp1,46 triliun yang dominan berasal dari Pendapatan Lainnya dan Pendapatan BLU. Penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019.

### a. Pendapatan BLU

Sesuai dengan namanya, pendapatan PNBPN yang terakhir ini berasal dari Satker BLU (Badan Layanan Umum). Terdapat 8 BLU di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pendapatan sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp926,83 miliar dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik II.4. Realisasi PNBPN BLU di Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019 (miliar rupiah).**



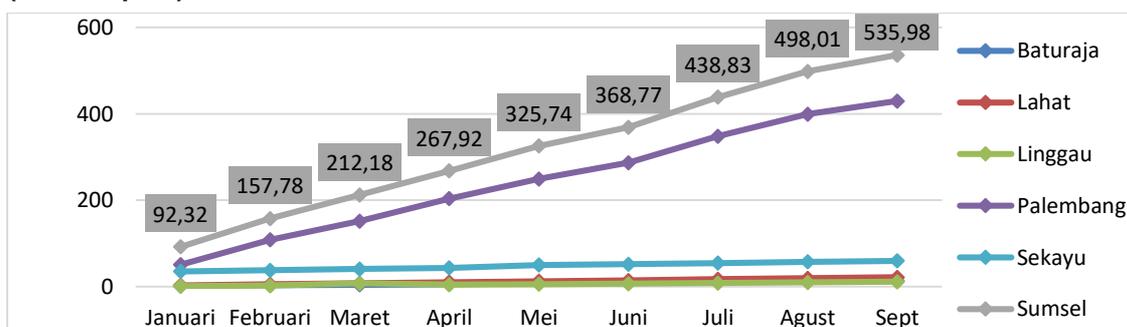
Sumber : OM-SPAN (diakses 07-08-2019)

Dari grafik diatas terlihat bahwa penerimaan PNBPN BLU pada triwulan III 2019 meningkat pesat Rp371,75 miliar dibandingkan penerimaan sampai dengan bulan Juni 2019. PNBPN BLU ini didominasi oleh BLU Pendidikan UNSRI (43,86%) dan BLU Kesehatan RSUP Dr. Moh. Hoesin (40,84%).

### b. Penerimaan PNBPN Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan triwulan III 2019 berjumlah Rp535,98 miliar atau 36,64 persen dari total PNBPN keseluruhan. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan 370 satker, baik satker umum maupun satker PNBPN.

**Grafik II.5. Realisasi PNBPN Lainnya Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan III 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : OM-SPAN (diakses 27-10-2019)



Dari 17 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 80,13% disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu dengan selisih yang mencapai Rp369,69 miliar. Hal ini disebabkan oleh jumlah satker pengguna PNPB belum banyak tersebar di Kab/Kota di luar wilayah kerja KPPN Palembang.

## B. Belanja Negara

Belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan III tahun 2019 berjumlah Rp9,26 triliun dengan rincian sebagai berikut:

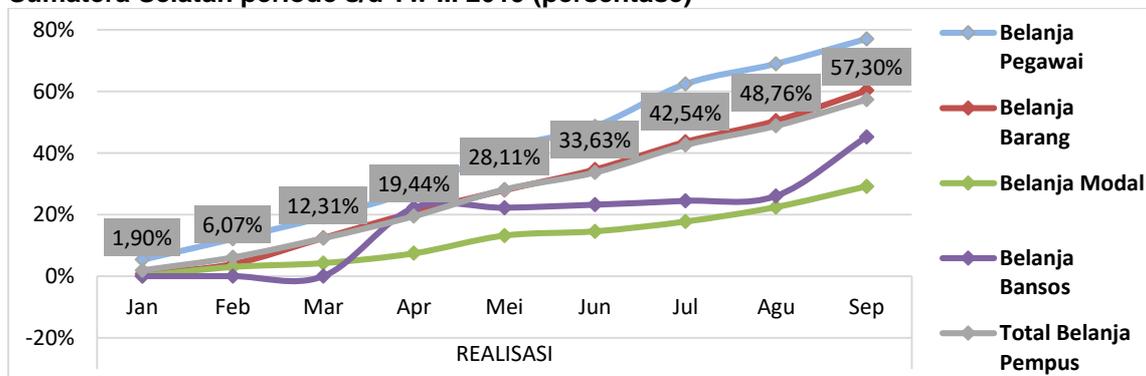
**Tabel II.3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja s/d Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)**

Jenis Belanja	2017		2018		2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	4.291,16	3.045,27	4.655,04	3.302,51	4.721,11	3.635,84
Belanja Barang	5.177,77	2.897,75	6.835,64	3.165,08	7.354,03	4.433,58
Belanja Modal	4.262,83	1.915,68	3.598,64	1.492,28	4.075,27	1.186,94
Belanja Bansos	26,47	17,96	13,57	5,36	18,03	8,15
<b>Jumlah</b>	<b>13.758,23</b>	<b>7.876,65</b>	<b>15.102,89</b>	<b>7.965,24</b>	<b>16.168,43</b>	<b>9.264,51</b>

Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 04-11-2019)

Pagu belanja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,06 persen dibandingkan pagu tahun 2018. Pagu belanja yang mengalami peningkatan paling tinggi dibanding tahun 2018 adalah Pagu Belanja Barang yang meningkat sebesar Rp518,38 miliar, diikuti oleh Belanja Modal sebesar Rp476,62 miliar, sementara Pagu Belanja Pegawai meningkat Rp66,07 miliar.

**Grafik II.6 Perkembangan Bulanan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode s/d Tw III 2019 (persentase)**



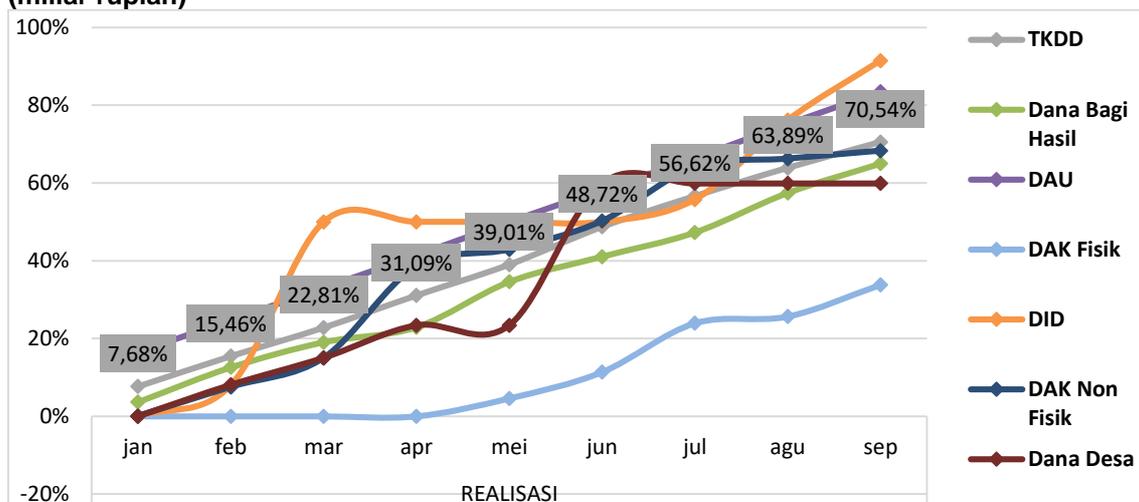
Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 04-11-2019)

Realisasi Total Belanja s/d Tw III pada tahun 2019 mencapai 57,30 persen, meningkat dibanding Realisasi periode yang sama pada Tahun 2018 yang sebesar 52,74 persen. Namun begitu angka tersebut masih dibawah target realisasi triwulanan yang sebesar 75 persen dikarenakan kontribusi realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih terlalu rendah dibandingkan targetnya.

## 2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD pada tahun 2019 mendapat alokasi pagu Rp32,57 triliun dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp22,97 triliun atau 70,54 persen. Adapun pada tahun 2019, sampai dengan triwulan III sudah terdapat realisasi Dana Desa sebesar Rp1,61 triliun ataupun 59,9 persen, jumlah ini tidak meningkat dibandingkan periode sampai dengan triwulan II. Sedangkan pada DAK Fisik baru terealisasi Rp739,21 miliar atau 33,80 persen. Rendahnya realisasi DAK Fisik tersebut dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemda baru dimulai pada bulan April dan lambatnya penyaluran tahap II s/d bulan September.

**Grafik II.7. Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 04-11-2019)

## 3. Pengelolaan BLU

Dalam menganalisa pengelolaan dana dan peningkatan layanan digunakan rasio BOPO yaitu menunjukkan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Data yang digunakan untuk menghitung BOPO adalah Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Beban Barang dan Jasa BLU.

**Tabel II.4. Pendapatan BLU dan Belanja yang menggunakan Sumber Dana BLU untuk BLU di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III 2019)**

Nama BLU	PNBP BLU	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Belanja Sumber Dana BLU	Beban Barang dan Jasa BLU	BOPO
Universitas Sriwijaya	407,73	369,09	268,08	247,80	67,14%
RSUP DR. Moh. Hoesin	379,63	369,77	356,53	350,60	94,82%
UIN Raden Fatah Palembang	88,85	87,74	47,41	44,73	50,98%
Rumkit Bhayangkara Palembang	25,82	24,84	23,14	23,01	92,63%
Balai Besar Labkes Palembang	10,78	10,30	7,96	7,73	75,02%
PTSDP Palembang	7,31	7,16	2,09	2,09	29,13%
Poltek Penerbangan Palembang	6,71	4,23	5,00	5,00	118,09%
RS Kusta Dr.Rivai Abdullah Palembang	2,80	2,79	2,20	2,05	73,53%
<b>Total</b>	<b>929,63</b>	<b>875,94</b>	<b>712,41</b>	<b>683,01</b>	<b>77,98%</b>

Sumber: Menu MONEVPA dari sistem OM SPAN (diakses 05-11-2019)

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa keseluruhan BLU memiliki nilai BOPO 77,98% yang dapat diartikan bahwa dalam menyediakan layanan, BLU tidak memungut tarif yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional kecil dan lebih dari setengahnya terpakai hanya untuk menunjang operasional. Khusus untuk Poltek Penerbangan Palembang memiliki Belanja yang melebihi pendapatan operasional, dimana keseluruhan belanja tersebut hanya untuk menunjang operasional layanan, bukan untuk peningkatan kualitas layanan. Selain Poltek Penerbangan Palembang, Poltek Transportasi, Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang juga tidak mengalokasikan Belanja untuk peningkatan fungsi layanan.

#### 4. Manajemen Investasi Pusat

##### a. Penerusan Pinjaman

**Tabel II.5. Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Posisi s.d. 30 Juni 2019**

Debitur	Pinjaman (SLA)		
	Jumlah SLA	Penarikan	Hak Tagih Pemerintah
Pemkot Palembang	11	49,794,345,477.44	64,933,488,506.69
Pemkab Ogan Komering Ulu	1	155,566,680.00	-
Pemkab Musirawas	1	-	263,817,337.08
Pemkab Muara Enim	1	97,148,652,820.00	90,870,136,690.96
PDAM Tirta Musi Palembang	2	16,881,325,892.42	-
<b>Posisi s.d. 2019</b>	<b>16</b>	<b>163,979,890,869.86</b>	<b>156,067,442,534.73</b>
<b>Posisi s.d. 2018</b>	<b>14</b>	<b>147,099,000,000.00</b>	<b>159,486,000,000.00</b>

Sumber: SLIM (diakses 16-07-2019)

Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 4 debitur dengan 14 pinjaman (SLA) menjadi 5 debitur dengan 16 pinjaman (SLA). Rekonsiliasi outstanding pinjaman yang dilakukan semesteran berlangsung baik dengan akurasi rekonsiliasi yang mencapai 100 persen. Pada triwulan III 2019 tidak dilakukan Rekonsiliasi Outstanding.

### b. Kredit Program

Kredit Program yang gencar disalurkan oleh Pemerintah adalah program KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha (UMKM dan koperasi) yang produktif dan layak (*feasible*) namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (*unbankable*).

**Tabel II.6. Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Perekonomian s/d September Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)**

Sektor	s/d 30 Sept 2019		PDRB Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)	Sensitifitas KUR Terhadap PDRB
	Penyaluran (dalam Miliar Rupiah)	Debitur (orang)		
Pertanian	1.092,64	31.960	50.360	2,23%
Perikanan	30,10	914		
Perdagangan Besar & Eceran	1.074,87	25.994	45.370	2,37%
Jasa Kemasyarakatan	96,00	3.151	0	0,00%
Industri Pengolahan	83,50	2.106	65.630	0,13%
Penyediaan Akomodasi	63,59	838	6.510	0,98%
Transportasi	43,50	760	8.310	0,52%
Konstruksi	42,46	218	42.150	0,10%
Real Estate	19,66	268	10.730	0,18%
Jasa Kesehatan	7,25	128	2.090	0,35%
Jasa Pendidikan	1,38	26	7.860	0,02%
Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha	0,04	3	0	0,00%
Pertambangan & Penggalian	0,03	1	69.810	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.555</b>	<b>66.367</b>	<b>339.460</b>	<b>0,75%</b>

Sumber: menu custom report sikip.kemenkeu.go.id. (diakses 31-10-2019)

Apabila dibandingkan secara kasar antara angka penyaluran berdasarkan sektor perekonomian dengan angka PDRB per sektor maka terlihat bahwa keseluruhan penyaluran KUR di Sumatera Selatan hanya mampu memberikan efek sebesar 0,75% terhadap PDRB Sumatera Selatan. Di antara seluruh sektor perekonomian tampak bahwa sektor Pertanian dan Perdagangan mampu memberikan pengaruh sebesar 2,23% dan 2,37%.

### C. Prognosis Realisasi APBN

Analisis yang digunakan untuk menghitung prognosis Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2019 menggunakan analisis trend berdasarkan pagu/target dan realisasi tahun 2017-2018.

**Tabel II.7. Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2019 (miliar rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tw-III		Perkiraan Realisasi s.d. Tw-IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Negara	17.289,14	8.330,84	48,19%	12.001,63	69,42%
Penerimaan Pajak	16.016,81	6.868,02	42,88%	10.185,21	63,59%
PNBP	1.272,33	1.462,82	114,97%	1.813,05	142,50%
Belanja Negara	48.736,73	32.237,06	66,15%	49.239,28	101,03%
Surplus/Defisit	-31.447,59	-23.906,22	76,02%	(37.237,64)	118,41%

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan APBD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2019. Terdapat 3 (tiga) sub bab yang menjadi pokok bahasan yaitu Pendapatan, Belanja, dan Prognosis APBD.

**Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar Rupiah)**

Uraian	2017			2018			2019		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
<b>PAD</b>	<b>5.866</b>	<b>3.237</b>	<b>55%</b>	<b>6.795</b>	<b>4.281</b>	<b>63%</b>	<b>7.061</b>	<b>4.592</b>	<b>65%</b>
Pajak Daerah	4.071	2.404	59%	4.403	3.263	74%	5.056	3.420	68%
Retribusi Daerah	242	104	43%	244	83	34%	244	93	38%
Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	205	116	57%	230	179	78%	216	183	85%
Lain-lain PAD yang Sah	1.349	613	45%	1.918	756	39%	1.545	897	58%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>26.304</b>	<b>19.672</b>	<b>75%</b>	<b>26.445</b>	<b>20.364</b>	<b>77%</b>	<b>32.711</b>	<b>23.903</b>	<b>73%</b>
Transfer Pusat- Dana Perimbangan	24.376	17.906	73%	23.524	18.509	79%	29.154	21.251	73%
DBH Pajak	2.886	1.826	63%	3.386	1.935	57%	3.648	2.677	73%
DBH Bukan Pajak	4.161	3.738	90%	3.953	2.575	65%	6.330	4.324	68%
DAU	11.838	9.744	82%	12.312	11.442	93%	12.886	10.686	83%
DAK	5.492	2.599	47%	3.874	2.556	66%	6.289	3.565	57%
<b>DID dan Dana Penyesuaian</b>	<b>1.015</b>	<b>649</b>	<b>64%</b>	<b>1.400</b>	<b>893</b>	<b>64%</b>	<b>1.325</b>	<b>841</b>	<b>63%</b>
Transfer Pemprov	900	1.083	120%	1.506	949	63%	1.963	1.794	91%
Bantuan Keuangan	13	34	257%	15	14	91%	269	17	6%
<b>LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.291</b>	<b>789</b>	<b>61%</b>	<b>2.039</b>	<b>951</b>	<b>47%</b>	<b>3.625</b>	<b>1.504</b>	<b>42%</b>
Hibah	65	28	43%	678	213	31%	1.075	257	24%
Dana Darurat				-	-				
Pendapatan Lainnya	1.227	761	62%	1.360	738	54%	2.550	1.248	49%
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>33.462</b>	<b>23.698</b>	<b>71%</b>	<b>35.278</b>	<b>25.596</b>	<b>73%</b>	<b>43.397</b>	<b>30.000</b>	<b>69%</b>

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp30 triliun, secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan dua periode yang sama namun persentasenya turun 4 persen dibandingkan Tahun 2018 dan 2 persen dibanding Tahun 2017. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan realisasi, namun komponen yang menyumbang peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dimana realisasi komponen PAD hanya meningkat sebesar Rp311 miliar dari Triwulan III Tahun 2018. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan dua periode sebelumnya sehingga pada Triwulan III Tahun 2019 mencapai 42 persen dari pagu Rp3,63 triliun.

Sedangkan pada sisi realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp23,48 triliun, menurun masing-masing 7 persen dan 4 persen dibandingkan dua periode yang sama Tahun 2018 dan 2017. Penurunan tersebut berasal dari realisasi

belanja modal yang baru mencapai 34 persen, sedangkan pada periode sebelumnya mencapai 43 persen dan 42 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat belanja modal merupakan belanja yang memiliki *multiplier effect* dalam jangka panjang terhadap perekonomian dibandingkan belanja operasi yang dampaknya hanya jangka pendek. Demikian juga Belanja Operasi dari tahun ke tahun realisasinya terus menurun dimana pada Triwulan III Tahun 2019 hanya mencapai 57 persen.

**Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar Rp)**

APBD Klasifikasi Ekonomi	2017			2018			2019		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>24.103</b>	<b>14.901</b>	<b>62%</b>	<b>25.119</b>	<b>15.973</b>	<b>64%</b>	<b>28.521</b>	<b>16.366</b>	<b>57%</b>
Belanja Pegawai	11.543	7.648	66%	12.255	7.877	64%	13.175	8.433	64%
Belanja Barang dan Jasa	7.559	3.818	51%	8.555	4.329	51%	11.127	5.344	48%
Belanja Bunga	14	6	45%	56	10	17%	68	30	44%
Belanja Subsidi	47	25	52%	53	28	52%	118	56	47%
Belanja Hibah	2.052	1.583	77%	2.096	2.488	119%	2.093	1.346	64%
Belanja Bantuan Sosial	15	5	33%	225	125	55%	554	322	58%
Belanja Bantuan Keuangan	2.872	1.816	63%	1.879	1.118	59%	1.385	836	60%
<b>Belanja Modal</b>	<b>7.995</b>	<b>3.330</b>	<b>42%</b>	<b>7.946</b>	<b>3.440</b>	<b>43%</b>	<b>11.386</b>	<b>3.852</b>	<b>34%</b>
Belanja Tanah	266	56	21%	96	111	116%	444	152	34%
Belanja Peralatan dan Mesin	860	339	39%	899	415	46%	1.382	451	33%
Belanja Gedung & Bangunan	1.594	611	38%	1.417	600	42%	1.886	566	30%
Belanja Jalan dan Jaringan	4.651	1.886	41%	5.259	2.180	41%	7.096	2.519	35%
Belanja Aset Tetap Lainnya	109	89	82%	254	106	42%	396	84	21%
Belanja KDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	515	349	68%	22	28	125%	182	79	44%
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>8%</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>3%</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>10%</b>
<b>Transfer/ Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa</b>	<b>1.155</b>	<b>579</b>	<b>50%</b>	<b>2.334</b>	<b>1.658</b>	<b>71%</b>	<b>5.546</b>	<b>3.257</b>	<b>59%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.346</b>	<b>18.818</b>	<b>56%</b>	<b>35.512</b>	<b>21.075</b>	<b>59%</b>	<b>45.520</b>	<b>23.482</b>	<b>52%</b>

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

## A. Pendapatan Daerah

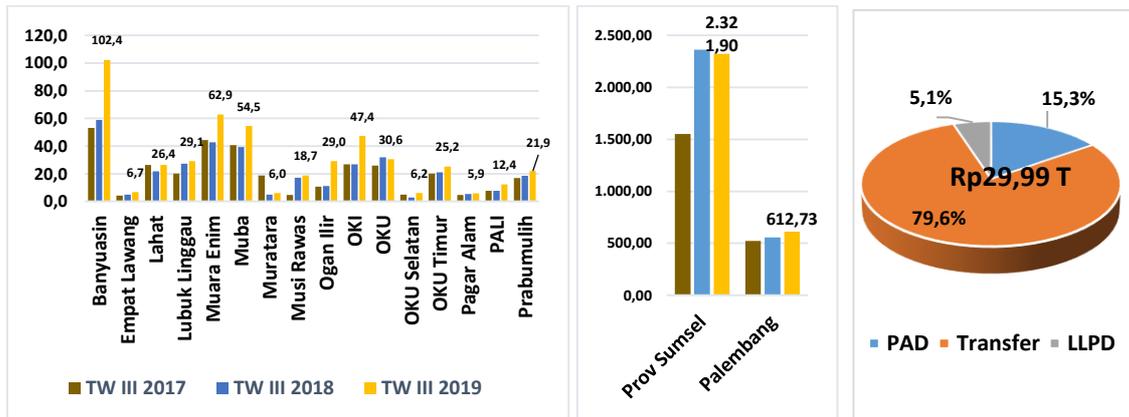
Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 mencapai 69 persen dari target (Rp43,40 triliun).

### 1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah secara agregat sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 mencapai Rp3,42 triliun atau mencapai 68 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian penerimaan pajak daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 6 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana pada triwulan III tahun 2018 capaian realisasi pajak daerah menunjukkan prestasi yang sangat baik yaitu mencapai 74 persen (meningkat 15 persen).



**Grafik III.1 Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar Rp)**



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

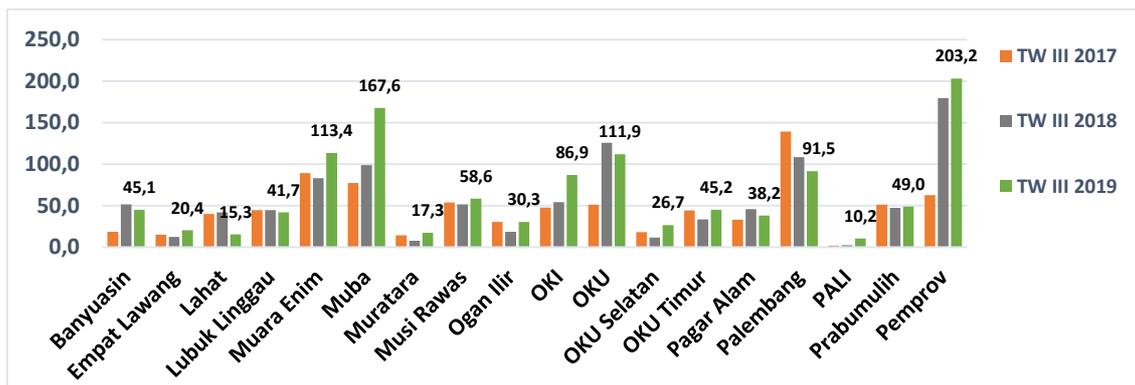
Provinsi Sumsel memberikan kontribusi terbesar capaian Pajak Daerah sebesar Rp2,32 triliun atau 67,89 persen dari agregat penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi Sumsel yang merupakan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan tingkat persentase capaian, Kabupaten Musi Rawas merupakan yang terendah yaitu hanya mencapai 38,99 persen dari pagu Rp47,89 miliar. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah yaitu PAD 15,3 persen, Pendapatan Transfer 79,6 persen dan LLPD (Lain-lain pendapatan daerah yang sah) 5,1 persen. Berdasarkan kontribusi ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat sangat tinggi yang berarti pula bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

*Tingkat kemandirian keuangan daerah diperoleh dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah dimana mayoritas di bawah rata-rata regional (15,3 persen). Daerah yang berada di atas rata-rata regional yaitu Provinsi Sumatera Selatan 36 persen, Kota Palembang 25,4 persen sedangkan di Pemerintah Kabupaten PALI jauh lebih rendah dari rata-rata regional yakni hanya mencapai 2,3 persen.*

**2. PAD Lainnya (RD, HPKD, LLPAD)**

PAD lainnya merupakan komponen PAD selain pajak daerah yang meliputi Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) yang pada Triwulan III Tahun 2019 realisasinya mencapai Rp1,17 triliun (58,47 persen dari target Rp2,01 triliun). Kinerja realisasi PAD lainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana realisasinya pada Triwulan III Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 masing-masing 46,38 persen, 42,56 persen dan 58,47 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya realisasi HPKD dimana pada Triwulan III Tahun 2019 mencapai 84,8 persen dari target Rp215,64 miliar.

**Grafik III.2. PAD Lainnya Triwulan III Tahun 2017-2019 (miliar Rp)**



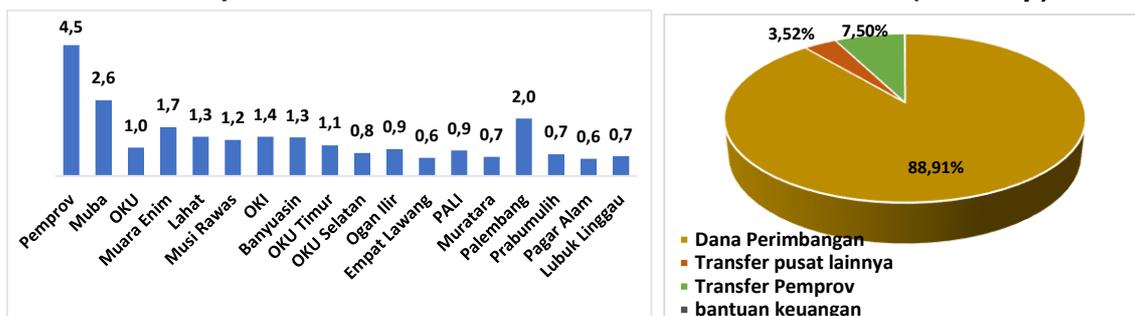
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa PAD lainnya Triwulan III Tahun 2019 yang meningkat cukup signifikan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) didorong oleh realisasi Lain-lain PAD Yang sah pada Triwulan III Tahun 2019 telah mencapai Rp148,32 miliar atau 71,49 persen dari target Rp207,47 miliar sehingga menyebabkan nilai realisasinya menjadi yang tertinggi diantara 17 Pemda lainnya meski secara persentase Kabupaten OKU memiliki realisasi tertinggi dengan 145,4 persen. Hal ini antara lain bersumber dari jasa giro dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

### 3. Penerimaan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 telah mencapai 73 persen dari target Rp32,71 triliun yaitu Rp23,90 triliun, yang bersumber dari Transfer Dana Perimbangan Rp21,25 triliun, transfer pusat lainnya Rp841 miliar, transfer pemerintah provinsi Rp1,79 triliun, dan bantuan keuangan Rp17 miliar.

**Grafik III.3. Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan III Tahun 2019 (triliun Rp)**



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Dilihat dari komposisinya, penerimaan transfer pusat memberikan kontribusi di atas 88 persen dari total pendapatan transfer. Penerimaan Transfer Pusat Triwulan III Tahun 2019 didominasi oleh DAU (50%), DBH (33%), dan DAK (17%). Tingginya porsi DAU yang melebihi DBH tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan desentralisasi dan perkembangan sektor migas yang belum membaik. Selain itu, DAK mendapatkan porsi yang signifikan sejalan dengan kebijakan transfer berbasis kinerja dimana penyaluran dana disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaannya.



Kapasitas penerimaan transfer tertinggi adalah Provinsi Sumsel (Rp4,5 triliun), dan Kabupaten Muba (Rp2,6 triliun) diikuti Kota Palembang (Rp2 triliun) dan Kabupaten Muara Enim (Rp1,7 triliun). Tingginya transfer di Kabupaten Muba didorong oleh produksi migas dan batubara di daerah tersebut.

*"..Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid mengatakan saat ini Sumsel mendapatkan kucuran DAU sekitar Rp16 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dari total Rp32,57 triliun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)."  
(<https://sumatra.bisnis.com/read/20190819/533/1138449/dau-sumsel-diyakini-meningkat-tahun-depan, diakses tanggal 8 November 2019>)*

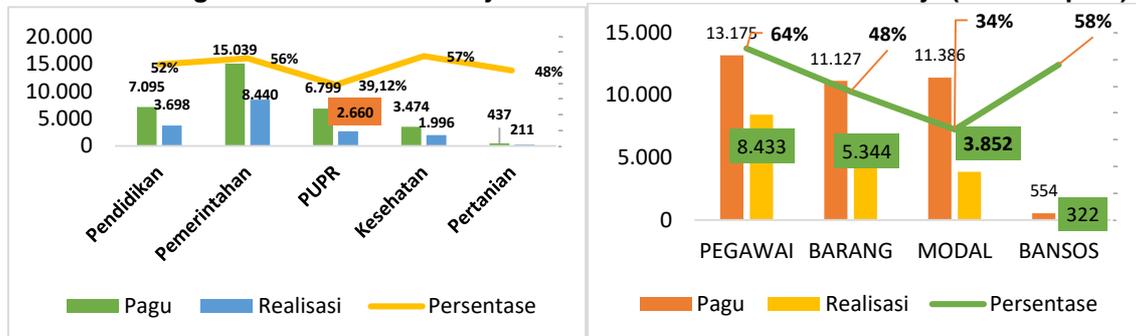
### B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp23,48 triliun (52 persen dari pagu Rp45,52 triliun).

#### Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan jenis belanja dengan pagu tertinggi masing-masing Rp13,12 triliun dan Rp11,13 triliun dengan realisasi Rp8,43 triliun (64%) dan Rp5,34 triliun (48%). Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja produktif antara lain untuk infrastruktur realisasinya baru sebesar Rp3,85 triliun (34 persen). Belanja bantuan sosial dengan pagu dan realisasi yang terendah mencapai 58 persen dari pagu, yang merupakan belanja bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

**Grafik III.4. Pagu dan Realisasi Belanja Per Urusan dan Per Jenis Belanja (miliar rupiah)**



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019), diolah

### C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Metode yang digunakan untuk menghitung prognosis atau perkiraan realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah menggunakan analisis tren. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

**Tabel III.3. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 dengan analisis tren (triliun rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	43.40	30.00	69.13%	40.95	94.36%
Belanja Daerah	45.52	23.48	51.59%	41.15	90.40%

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Pendapatan negara konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen pendapatan perpajakan dan hibah. Pajak dalam negeri sebagai komponen terbesar pendapatan perpajakan meningkat 27,3 sedangkan pada komponen hibah naik 20,4 persen dari tahun sebelumnya dan seluruhnya berasal dari hibah Pemerintah Daerah lainnya. Pada komponen pendapatan bukan pajak terjadi kenaikan sebesar 18,1 persen.

**Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 (miliar Rupiah)**

Uraian	2019				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	10.816,09	5.958,35	16.774,45	25,0%	13.419,06
Pendapatan Perpajakan	9.353,27	3.419,87	12.773,14	27,3%	10.033,92
Pendapatan Bukan Pajak	1.462,82	2.281,93	3.744,75	18,1%	3.172,12
Hibah	0,00	256,55	256,55	20,4%	213,02
Transfer *)	0,00	22.302,08	22.302,08	13,4%	19.671,65
Belanja Negara	9.261,57	19.074,82	28.336,38	-0,3%	28.433,55
Belanja Pemerintah	9.261,57	19.074,82	28.336,38	-0,3%	28.433,55
Transfer *)	22.972,55	2.667,61	25.640,15	8,9%	23.548,26
Surplus/(Defisit)	-21.418,02	-13.116,46	-14.900,01	-21%	-18.891,10
Pembiayaan	0,00	1.743,92	1.743,92	-940%	-207,66
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	2.009,68	2.009,68	238%	593,98
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	265,76	265,76	-66,8%	801,63
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-21.418,02	-11.372,54	-13.156,09	-31%	-19.098,75

\*) Pendapatan Transfer dan Belanja/Pengeluaran Transfer dieliminasi

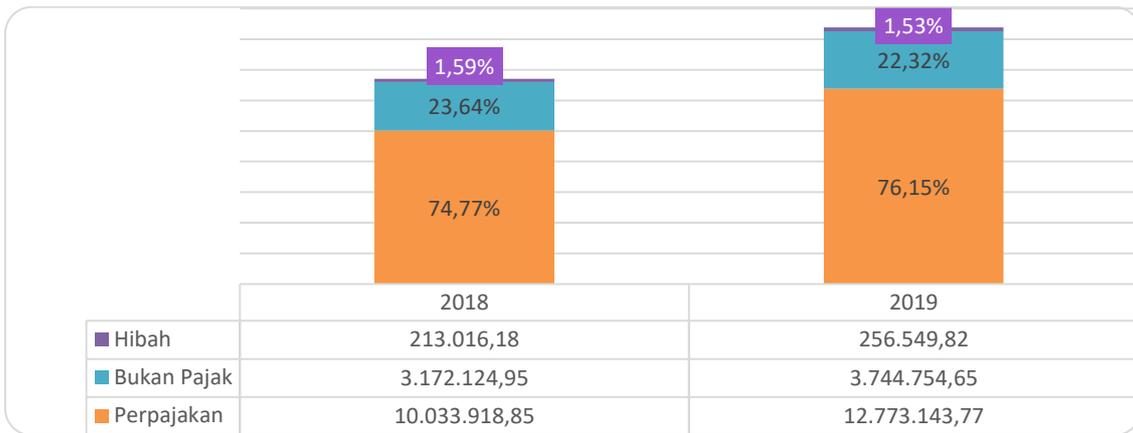
Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah

##### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

##### Analisis Proporsi dan Perbandingan

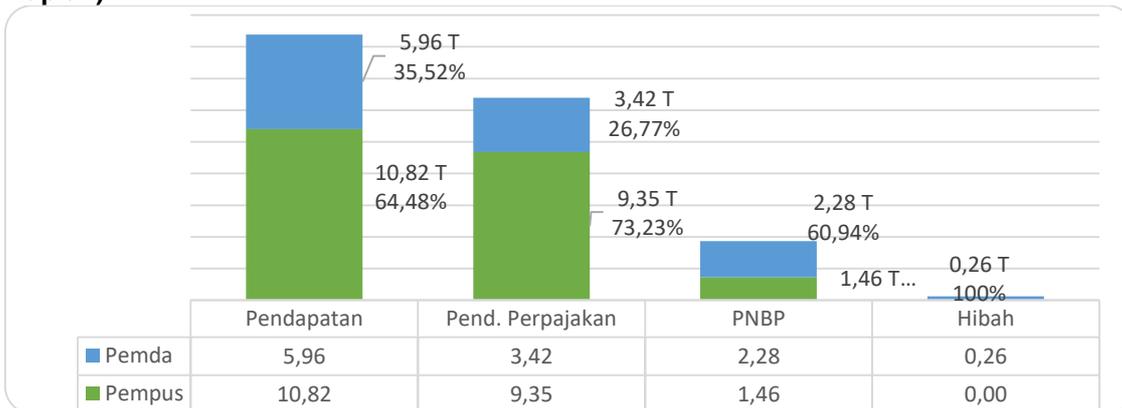
**Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2018 (jutaan Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah.

Grafik IV.1 menunjukkan komposisi pendapatan konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 76,15 persen. Penerimaan perpajakan secara nominal meningkat 27,29 persen atau mencapai Rp12.773,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah yang sedang menggenjot penerimaan pajak terutama dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dari sisi proporsi, terjadi peningkatan persentase penerimaan perpajakan dari 74,77 persen menjadi 76,15 persen. Sedangkan pendapatan bukan pajak mengalami penurunan proporsi dari 23,64 persen turun menjadi 22,32 persen, tetapi secara nominal terjadi peningkatan sebesar 18,05 persen atau mencapai 3.744,75 miliar. Penerimaan hibah secara nominal terjadi peningkatan, tetapi secara proporsi terjadi sedikit penurunan.

**Grafik IV.2. Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 (triliun Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah.

Grafik IV.2 menunjukkan bahwa pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan pemerintah pusat sebesar 64,48 persen, sedangkan pendapatan pemerintah daerah mencapai 35,52 persen. Apabila dilihat lebih rinci lagi, pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan itu sendiri didominasi oleh penerimaan dari pemerintah pusat sebesar 73,23 persen.

Namun dominasi pemerintah pusat tidak terjadi pada penerimaan bukan pajak, yang mayoritas penerimaannya berasal dari pemerintah daerah yang mencapai 60,94 persen. Sedangkan penerimaan lainnya, yaitu hibah seluruhnya berasal dari pemerintah daerah atau 100 persen.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

#### Analisis Proporsi dan Perbandingan

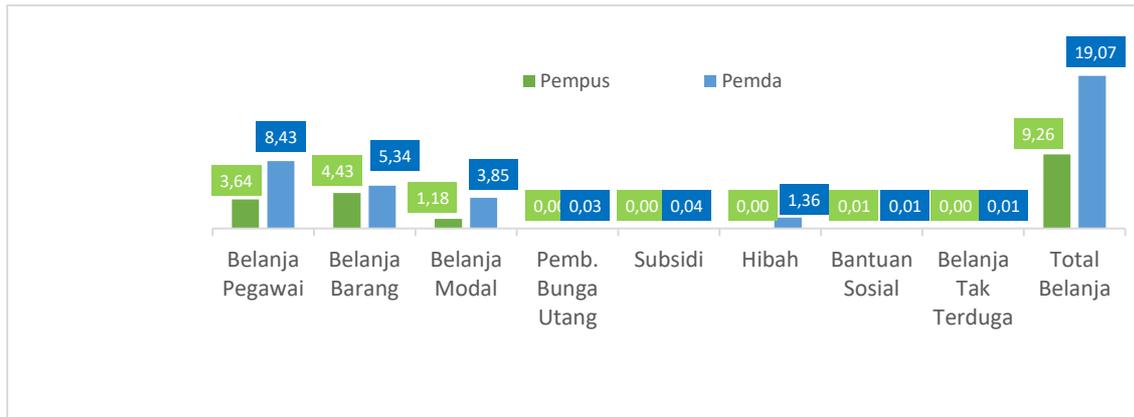
**Grafik IV.3 Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2018 (jutaan Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah

Belanja Konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari Rp28,43 triliun pada Triwulan III Tahun 2018 menjadi Rp28,34 triliun. Kontribusi belanja paling besar berasal dari belanja pegawai yang mencapai 42,58 persen dari total belanja konsolidasian atau sebesar Rp12,07 triliun. Namun apabila dilihat dari sisi pertumbuhan belanja, terdapat modal yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat produktif menurun dari tahun sebelumnya sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk jenis belanja lainnya seperti hibah mengalami penurunan sebesar 45,38 persen. Belanja hibah ini berupa hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan organisasi kemasyarakatan. Namun untuk belanja bantuan sosial naik sebesar 50 persen, sedangkan belanja subsidi dan belanja lain-lain/tak terduga juga mengalami kenaikan.

**Grafik IV.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III 2019 (triliun Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019, diolah).

Hal lain yang dapat dilihat secara lebih detail dari grafik di atas adalah belanja Pemerintah Daerah masih menominasi belanja konsolidasi sebesar 67,29 persen atau sebesar Rp19,07 Triliun dari total belanja sebesar Rp28,34 Triliun. Belanja pegawai Pemerintah Daerah masih mendominasi belanja yaitu 29,74 persen, sedangkan belanja pegawai Pemerintah pusat sebesar 12,84 persen. Untuk belanja Pemerintah Pusat dan Daerah belanja barang dan belanja modal menjadi belanja terbesar selanjutnya setelah belanja pegawai.

#### D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun Pelaporan 2019:

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto		
<b>Pendapatan</b>		<b>51.615.521.369.193,0</b>
a	Pajak	12.729.386.763.708,0
b	Kontribusi Sosial	-
c	Hibah	2.856.073.727.792,0
d	Pendapatan Lain	36.030.060.877.692,0
<b>Beban</b>		<b>5.251.985.490.822,5</b>
a	Kompensasi Pegawai	12.391.090.165.180,0
b	Pembangunan Barang dan Jasa	8.533.812.196.199,0
c	Konsumsi aset tetap	-
d	Bunga	28.620.186.095,0
e	Subsidi	41.182.141.326,0
f	Hibah	7.276.980.907.119,0
g	Manfaat Sosial	17.264.110.359,0
h	Beban lainnya	953.828.304.766,0
<b>Keseimbangan operasi bruto/neto</b>		<b>22.372.743.358.148,0</b>
<b>Transaksi Aset Non Keuangan Neto</b>		<b>5.038.577.266.823,0</b>
a	Aset tetap	4.974.046.833.298,0
b	Persediaan	-
c	Barang Berharga	-
d	Aset Non Produksi	64.530.433.525,0

	<b>Net Lending Borrowing</b>	<b>17.344.166.091.324,0</b>
	<b>Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban</b>	<b>-</b>
a	Akuisisi Neto Aset Keuangan	17.377.999.268.817,0
	-Domestik	17.377.999.268.817,0
	-Luar Negeri	-
b	Keterjadian Kewajiban	-
	-Domestik	43.833.177.492,0
	-Luar Negeri	-
	<b>SILPA Konsolidasian</b>	<b>-</b>

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Dari tabel laporan operasional tersebut diatas dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp20.942.166.471.738,- yang terdiri dari:
  - a. Kompensasi pegawai sebesar Rp12.391.090.165.180,-
  - b. Penggunaan barang dan jasa sebesar Rp8.533.812.196.199,-
  - c. Konsumsi aset tetap sebesar Rp0,-
  - d. Manfaat sosial sebesar Rp17.264.110.359,-
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) sebesar Rp4.974.046.833.298,-
3. PDRB Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp118,16 triliun.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terhadap PDRB sehingga angka yang diperoleh adalah sebesar 17,72 persen. Demikian juga kontribusi belanja aset tetap pemerintah sebagai PMTB dari pemerintah dibandingkan dengan nilai PDRB sehingga diperoleh angka sebesar 4,20 persen. Dilihat dari kontribusi tersebut, pengeluaran konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan belanja pegawai bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, misalnya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di triwulan berkenaan. Dengan demikian peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi kurang optimal apabila realisasi belanja pemerintah tidak terserap secara proporsional dan cenderung menumpuk di akhir tahun.

“Pendapatan negara konsolidasian dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya tumbuh 25,00 persen yang didominasi oleh pertumbuhan dari komponen pendapatan perpajakan dalam negeri. Sedangkan belanja negara konsolidasian juga tumbuh 0,3 persen”



## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI EKSTENSIFIKASI PAJAK RESTORAN

APBD merupakan perwujudan dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk keperluan pendanaan belanja pemerintah daerah tersebut terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping Bagian Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jika Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan, maka pemerintah daerah mendapatkan tambahan dana untuk membiayai pengeluarannya dan meningkatkan citra keuangan pemerintah daerah menjadi daerah yang mandiri karena mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat.

Target PAD Kota Palembang pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.657.808.205.237 dengan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan III tahun 2019 sebesar Rp. 704.242.243.659 atau 42,48% dari target yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatannya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan yang sah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Palembang adalah Pajak Restoran.

Target penerimaan Pajak Daerah sendiri ditetapkan sebesar Rp 1.314.232.400.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan III 2019 sebesar Rp 612.725.558.157 atau 46,62% dari target yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pajak restoran ini dipungut atas setiap pembayaran jasa pelayanan di restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain dengan omzet penjualan minimal Rp. 100.000 per hari. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Adapun Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang tentu diramaikan pusat wisata kuliner dan restoran. Dalam rangka meningkatkan PAD dari pajak ini, Pemerintah Kota Palembang melakukan ekstensifikasi pajak restoran di Kota Palembang. Restoran, restoran berjalan, restoran disiapkan hotel, rumah makan,

warung depot, kaki lima, warung tenda, bar, toko roti, dan lainnya yang menyediakan meja dan atau kursi untuk konsumen makan di tempat dan beromzet minimal Rp. 100.000 perhari atau Rp. 3.000.000 per bulan dikenakan pajak restoran sebesar 10%.

Pemerintah Kota Palembang menyasar pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh oleh pengenaan pajak restoran termasuk usaha kuliner yang populer di Palembang seperti warung pempek. Untuk meminimalisir kecurangan dalam penghitungan, pelaporan, maupun pembayaran pajak, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang melaksanakan pemungutan pajak melalui pemasangan *e-tax*. *E-Tax* bekerja dengan cara merekam transaksi pembayaran. *E-tax* ini berfungsi sebagai *Transaction Monitoring Device (TMD)*. Rekaman transaksi ini membuat nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Alat ini akan memantau dan menghitung pajak atas transaksi penjualan pada tempat-tempat usaha yang sudah terpasang alat tersebut.

Namun demikian, tidak semua pelaku ekonomi sepakat dengan kebijakan pajak restoran yang dikenakan Pemerintah Kota Palembang tersebut. Forum Komunikasi Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) keberatan dengan adanya pemasangan alat *e-tax* pada tempat-tempat usaha mereka. Alasan keberatan tersebut antara lain dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah lima tahun terakhir sehingga terjadi penurunan daya beli, dan pengenaan pajak restoran sebesar 10% dinilai terlalu tinggi. Terlebih Pemerintah Kota Palembang belum pernah menyosialisasikan rencana pemasangan *e-tax*. Berdasarkan pengalaman beberapa restoran dan rumah makan yang telah memasang alat tersebut terjadi penurunan omzet sebesar 30% dalam jangka waktu 3-5 hari setelah pemasangan.

Meskipun demikian, penyegelan tetap dilakukan terhadap tempat usaha yang menolak dipasang alat *e tax*. Tindakan penyegelan tersebut misalnya terjadi pada Restoran Bakso Granat Mas Aziz dengan alamat Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019. Namun kembali dibuka setelah pemilik usaha bersedia dilakukan pemasangan *e-tax*.

Dengan adanya kebijakan pemasangan alat *e-tax* tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap akan ada lonjakan signifikan pendapatan daerah. Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin, menyatakan program *e-tax* sudah membantu pendapatan kota hingga 3,5 milyar per bulan. Besaran dan persentase kenaikan pendapatan daerah belum bisa diketahui secara pasti karena kebijakan tersebut baru saja diterapkan pada Triwulan III tahun 2019 ini.

Penyusun :  
Penanggung Jawab : Tauhid  
Ketua Tim : Siti Rosidah Sundari  
Editor : Firza Yulianti  
Desain Grafis : Hasbi Jusuma Leo  
Anggota : Arif Bakhri, Subur, Ahmad Firdaus,  
Markus Yulianto, Lukas Wanastya



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 JALAN KAPTEN A, RIVAI NO.2-4 PALEMBANG  
TELEPON 0711-351476 3, 356534, FAKSIMILE 0711-310891

**NOTA DINAS**

Nomor: ND-~~178~~W/PB.07/2019

Kepada : Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian KFR Triwulan III Tahun 2019  
Tanggal : 13 November 2019

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2019 yang softcopy-nya kami kirimkan ke alamat email [ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id) cc [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com).

Adapun sistematika dalam KFR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Regional
2. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
3. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
4. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
5. Berita Fiskal Regional Terpilih

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
Taukhid